

# Faktor-Faktor Bantuan Luar Negeri Israel pada Masa Pemerintahan Benjamin Netanyahu Terhadap Minoritas Druze di Suriah

**Nur Afifah Agustina**

Departemen Hubungan Internasional,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga  
Email: ifaagustina94@gmail.com

## Abstract

*This reasearch based on the problem of factors giving foreign aid Israel during the reign of Benjamin Netanyahu against the Druze minority during the Syrian civil war. This is problematic, since Israel originally based on the idea of Israel as a "passive onlooker" and subsequently turned into an active role in assisting the Druze minority near the Syrian border requires some explanation. The Syrian Druze who positioned his neutrals in civil war brought harm to his own people, being exploited by the jihadists of the Islamic State (IS) to justify attacks and repressive measures against the Syrian Druze. It is necessary to elaborate further on the factors causing the Israeli decision to ultimately provide its foreign assistance to the Druze. This study uses the framework of the realism approach in International Relations namely the power and security dilemma in the Israeli decision to provide foreign aid to the Syrian Druze. Then combine it with a bureaucratic incrementalism theory that explains that foreign aid is influenced by public pressure and opinion. This study is qualitative using secondary data, such as books, journals, documentaries, and articles. From the analysis of these data, it is found that the provision of aid made Israel is a form of symbolic domination by Israel efforts against the Syrian Druze. This is reinforced by the public pressure and public opinion of the Israeli Druze that pushed Israel to deploy aid. This grant was also attributed to Israel's security dilemma over IS's repressive actions against the Syrian Druze close to the Syrian-Israeli border so as to make buffer zone as a reaction to border threats.*

**Key Words:** *Israel's Foreign Aid, Syrian Druze, Symbolic Domination, Public Pressure, Security Dilemma, Islamic State (IS), Buffer Zone*

## Abstrak

*Penelitian ini dilakukan berdasarkan masalah faktor-faktor pemberian bantuan luar negeri Israel pada masa pemerintahan Benjamin Netanyahu terhadap kaum minoritas Druze saat perang sipil Suriah. Hal ini menjadi problematis mengingat Israel yang awalnya didasarkan pada gagasan Israel sebagai "passive onlooker" dan kemudian berubah menjadi berperan aktif dalam membantu kaum minoritas Druze di dekat perbatasan Suriah membutuhkan beberapa penjelasan. Kaum Druze Suriah yang memposisikan kaumnya netral dalam perang sipil membawa bahaya bagi kaumnya sendiri, sebab dimanfaatkan oleh para jihadis Islamic State (IS) untuk menjustifikasi serangan dan tindakan represif terhadap kaum Druze Suriah. Perlu untuk mengelaborasi lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebab keputusan Israel pada akhirnya memberikan bantuan luar negerinya terhadap kaum Druze. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran dari pendekatan realisme dalam Hubungan Internasional yakni mengenai power dan dilema keamanan dalam keputusan Israel memberikan bantuan luar negeri terhadap kaum Druze Suriah. Kemudian mengkombinaksikanya dengan teori inkrementalisme birokratis yang menjelaskan bahwa bantuan luar negeri dipengaruhi oleh tekanan dan opini publik. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data-data sekunder, seperti buku, jurnal, video dokumenter, dan artikel. Dari analisis data-data tersebut didapat bahwa, pemberian bantuan yang dilakukan Israel merupakan bentuk upaya dominasi simbolik oleh Israel terhadap kaum Druze Suriah. Hal tersebut diperkuat oleh desakan dan opini*

publik Druze Israel yang mendorong Israel untuk menerjunkan bantuan. Kemudian pemberian bantuan ini disebabkan juga karena dilema keamanan Israel atas tindakan represif IS terhadap Druze Suriah yang dekat dengan perbatasan Israel-Suriah sehingga dilakukan pembuatan buffer zone sebagai bentuk reaksi terhadap ancaman di perbatasan.

**Kata kunci:** Bantuan Luar Negeri Israel, Druze Suriah, Dominasi Simbolik, Desakan Publik, Dilema Keamanan, Islamic State (IS), Buffer Zone

## Latar Belakang Permasalahan

Druze merupakan sebuah agama yang memiliki percampuran dengan budaya, sekaligus suatu komunitas masyarakat yang mempunyai kepercayaan berakar dari Timur Tengah. Tiga konsentrasi terbesar kaum Druze berada di Suriah, Lebanon, dan Israel. Druze Suriah adalah kaum minoritas dan telah berusaha untuk menghindari keterlibatan lebih dalam perang sipil Suriah tahun 2011, namun posisi strategis mereka di wilayah selatan pegunungan Jabal al-Druze tentu memberikan pengaruh lebih (Balanche,2016). Sementara masyarakat lain berada di garis depan pertempuran seperti Yazidi dan Kristen, sering dibantai oleh ekstrimis Sunni. Druze Suriah yang berjumlah sekitar tiga persen dari populasi negara, terjebak di antara landasan anarki dari ekstremisme Islam di tengah ekspansi kelompok jihad dalam konflik (Hazran,2016). Selain itu, kelemahan militer Druze dan etnosentrisitas juga membawa Druze ke dalam konflik dengan pemerintah Damaskus (Ostrovitz,1983:272). Kenaikan Presiden Bashar Al-Assad yang berkuasa tidak memiliki efek signifikan pada hubungan Druze kepada rezim. Rezim Assad sendiri tidak mampu memberikan uluran tangannya, disertai dengan tidak memiliki keinginan untuk membantu. Kemudian juga dapat dikatakan bahwa pasukan Assad sedang mengalami pemogokan dalam melakukan penyerangan. Assad saat ini fokus untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari rezimnya dan yang menjadi puncak prioritasnya adalah Damaskus serta pesisir yang menjadi rumah bagi tulang punggung rezimnya yaitu orang-orang Alawi. Berbeda dengan sekte Alawi, Druze tidak memainkan peran cukup penting dalam kelangsungan

rezim oleh karena itu harus berjuang untuk diri mereka sendiri (Zisser,2015).

Pada tahun 2011 dan 2012, beberapa protes pro-oposisi berlangsung di provinsi Swaida . Banyak timbul demonstrasi yang memicu tindak kekerasan dan konflik sektarianisme yang meningkat (Al-Assilm & Slim,2015). Druze bukanlah peserta aktif dalam demonstrasi di awal revolusi Suriah melawan rezim Al-Assad pada tahun 2011. Meskipun beberapa protes terjadi di daerah Druze Swaida, Druze tetap pasif secara keseluruhan. Seruan untuk berpartisipasi sangat banyak, namun kebanyakan kaum Druze tidak tertarik. Tidak ada data akurat juga mengenai jumlah Druze yang berpartisipasi dalam demonstrasi di Damaskus atau daerah lain di mana Druze berpartisipasi dalam jumlah besar (Abdel-Samad,2016).

Loyalitas Druze untuk rezim Ba'ath bukan berbentuk taqqiya (penyembunyian identitas agama untuk melindungi keamanan pribadi) hal tersebut merupakan fungsi dari struktur masyarakat Suriah, dan disitulah kaum Druze secara tidak langsung memancing terbukanya jalan pada pemberontakan bagi ekstrimis muslim. Islamisasi meningkat dari oposisi, munculnya jihadis dalam konflik, dan disintegrasi otoritas negara telah merongrong kaum Druze Suriah (Centre on Religion & Geopolitics,2014). Sejak tahun 2012 Druze Suriah telah menjadi titik fokus dalam pertempuran yang signifikan. Pembantaian puluhan Druze memvalidasi kekhawatiran ekspansi jihad. Munculnya kelompok salafi-jihad sebagai salah satu wajah dominan oposisi untuk rezim secara dramatis telah mengubah sifat konflik yang semakin mengancam kaum Druze. Prinsip takfir, atau menyatakan orang lain sebagai kafir (non-Muslim) digunakan untuk

melegitimasi kekerasan terhadap kaum yang dianggap kafir tersebut, yang kemudian hal tersebut menjadi prinsip utama dari ideologi kelompok ekstrimis seperti IS. Status Druze sebagai sekte heterodoks dianggap kafir oleh kelompok IS (Islamic State) yang memang memandang Druze sebagai bid'ah. Fenomena salafi-jihadisme dalam oposisi yang tertuju pada IS, telah mendorong minoritas Druze menuju integrasi yang lebih besar (Centre on Religion & Geopolitics,2014).

Seperti di tahun 2012, IS mulai menyentuh Druze melalui penyerangan dari Provinsi Deraa ke Desa Mjeimar Provinsi Swaida (Landis,2016). Hubungan antara Druze Suriah dan jihadis (IS) semakin memanas sejak akhir tahun 2013. Ada beberapa titik utama yang digunakan IS sebagai operasi tindakan represifnya, yaitu pertama di barat laut Jabal al-Druze Provinsi Swaida, kedua di Provinsi Idlib, ketiga di sisi perbatasan Suriah-Israel Al-Quneitra. Tahun 2014, di Suriah timur, IS memiliki kebebasan manuver di antara Palmyra menuju Deir ez-Zour, Provinsi Raqqa dan di selatan Swaida (Choufi,2013). Ketika tanah Idlib di kuasai oleh Free Syrian Army (FSA) atau rezim Assad tidak ada potensi ancaman yang berarti bagi Druze, namun ketika IS memimpin dan menduduki beberapa desa yang dulu berada dibawah kendali FSA atau rezim, kaum Druze ini tertekan. Wilayah selatan dekat perbatasan dengan Yordania dan Israel juga menjadi salah satu daerah di mana Presiden Bashar Al-Assad kehilangan tanah kekuasaan, sebab direnggut oleh jihadis dalam perang sipil (IsraelNews,2015). Banyak kaum Druze yang tinggal disana dipaksa untuk mengakui eksistensi IS. IS membawa aturan syariah untuk mengelola kehidupan penduduk desa. Menuntut Druze masuk Islam, mencoba memaksakan kode berpakaian dan langkah-langkah aturan Islam yang ketat seperti menambah kubah menara tempat berdoa kaum Druze, dan memaksa untuk menghancurkan tempat suci mereka sendiri. Ditambah lagi memaksa tanah mereka untuk diserahkan dan dijarah

secara masal. Di provinsi Idlib pula, karena mengetahui netralitas yang dimiliki kaum druze, maka IS memaksa kaum Druze untuk menentukan posisinya mengumumkan konversi mereka ke IS (Choufi,2013). Disisi lain, tahun 2015 para jihadis IS menduduki bukit Tal Ahmar 1,5 kilometer timur laut dari Khader. Menghubungkan desa ke arah barat berbatasan dengan Israel, dan juga timur laut menuju Damaskus (Centre on Religion & Geopolitics,2014). IS memblokir jalan ke Damaskus, mencoba mengisolasi Khader dari sisa Suriah, serta menyerang orang-orang Druze. Kerusakan juga terjadi di perbatasan Dataran Tinggi Golan saat itu karena terjadi kekosongan kekuasaan. (Kasolowsky & Heller,2015).

Kaum Druze sedang dalam posisi yang dilematis, disatu sisi ingin terbebas dari rezim pro-Assad karena mereka merasa telah di eksploitasi oleh Assad, (Zsakola,2016) disatu sisi ingin memposisikan dirinya netral dari kelompok jihad IS di Suriah. Di tahun 2011 tepatnya tanggal 17 September, para pemimpin Druze Israel telah menghadiri pertemuan dengan Druze Suriah di Damaskus, mereka membicarakan tentang bagaimana sikap netral Druze Suriah ini dipertanyakan oleh banyak pihak. Adanya kekosongan keberpihakan membuat IS geram dan berusaha memanfaatkan netralitas kaum Druze di daerah selatan Suriah dengan mendesak serta mengancam kaum Druze (Choufi,2013).

Selama 2013 hingga 2015, terjadi perdebatan di Israel apakah tentara harus turun tangan untuk melindungi masyarakat Druze dari jihadis atau tidak (Dermer,2016). Posisi pemerintahan Netanyahu awalnya jelas, bahwa Israel tidak akan mengirim bantuan dan pasukan militer untuk Druze Suriah. Gadi Eisenkot pun menyatakan bahwa Israel tidak akan berdiri membantu jika pembantaian terjadi di desa-desa Druze Suriah (Harel,2015). Namun, pada akhirnya keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Kepala Staff Umum IDF Gadi Eisenkot

mendeklarasikan dukungannya untuk kaum Druze (Mounsour,2015). Dalam sebuah pidato kepada komite Knesset pada tanggal 18 Juni 2015, Netanyahu mengatakan bahwa akan melakukan apa yang diperlukan untuk membantu komunitas Druze di Suriah, tanpa menjelaskan lebih jauh mengenai rencana pemerintah Israel. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Reuven Rivlin yang mengungkapkan bahwa “Apa yang terjadi adalah intimidasi terhadap keberadaan Druze yang sangat dekat dengan perbatasan Israel, (IsraelNews,2015) ini adalah proyek yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya sebagai Presiden berusaha melakukan semua yang saya bisa untuk mendorong pemerintah melakukan bantuan semaksimal mungkin, sehingga tidak hanya diungkapkan melalui pernyataan, tapi juga dipraktekkan untuk membantu” (Dermer,2016). Wakil Menteri Israel Bidang Komunikasi Ayoub Kara mengatakan bahwa semua pihak harus bisa memahami pertempuran yang dialami oleh Druze di Suriah dan IS tidak akan dengan semudah itu berhenti. Kara juga berpendapat bahwa masalah ini bagian dari Israel (Mitchell,2015).

Netanyahu mendapatkan dukungan dari setiap aktor yang membantu untuk memberikan pernyataan resminya. Kemudian Presiden Reuven Rivlin, Netanyahu, ada juga Ya'alon, Kepala Staf Angkatan Darat Israel dan Letnan Jenderal Gadi Eisenkot melakukan sebuah pertemuan membahas tentang kekhawatiran atas situasi Druze di Suriah dan menawarkan bantuan militer dan kemanusiaan pada Druze Suriah melalui perbatasan Dataran Tinggi Golan (Harel,2015). Merujuk pada respon Israel dalam tindakan represif IS terhadap kaum Druze Suriah di perbatasan Suriah-Israel mengindikasikan suatu jeda pemahaman yang menunjukkan bahwa awalnya pemerintah Israel secara tegas menyatakan bahwa tidak akan berdiri jika terjadi pembantaian. Namun ternyata Israel kemudian mendukung dan mengirimkan bantuannya terhadap

Druze di Suriah. Pada kenyataannya Druze merupakan kaum minoritas netral yang cenderung terbuang dalam rezim Assad. Pada dasarnya mereka juga bukanlah zionis, bahkan bukan beragama Yahudi. Menarik untuk dibahas lebih lanjut, sebab agenda ini merupakan pertama kalinya Israel melakukan bantuan luar negeri terhadap Druze di Suriah. Selain itu belum ada peneliti lain yang membahas mengenai respon Israel ketika Druze terkena tindakan represif dari IS. Serta penting untuk dianalisis lebih mendalam terkait tujuan peneliti menunjukkan signifikansi tindakan represif para jihadis IS terhadap pergerakan kaum Druze yang minoritas di Suriah, dalam Israel menyikapi hadirnya ancaman baru di perbatasan wilayah mereka.

### **Kerangka Pemikiran**

Fenomena ini dapat dijelaskan setidaknya dengan tiga kerangka pemikiran, pertama pandangan realisme terhadap bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri menurut Robert Gilpin (1987) dalam bukunya “The Political Economy of International Relations” diartikan sebagai sejumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif maju atau kaya kepada negara yang secara ekonomi lebih lemah. Sedangkan arti luas, K.J. Holsti (1995) dalam bukunya “International Politics: Framework of Analysis” mengartikan bantuan luar negeri sebagai bentuk transfer uang (bantuan financial), teknologi, ataupun nasihat-nasihat teknis dari negara donor untuk kepentingan negara penerima atau penduduknya. Pada intinya bantuan luar negeri dapat menyelamatkan nyawa jutaan orang yang hidup di dunia. Isu-isu yang dibahas pun bervariasi seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keadaan darurat kemanusiaan.

Sistem Internasional yang anarki menciptakan sebuah kebebasan yang otonomis diantara negara-negara. Hal tersebut mendesentralisasikan sistem internasional bagi setiap negara berdaulat, sehingga berhak menggunakan power mereka diatas

sebuah defined territory, a population dan a government. Dalam kondisi seperti ini, bantuan luar negeri atau foreign aid hanya menjadi alat untuk mencapai kepentingan nasional. Sebuah negara memainkan kekuatan politiknya untuk bisa mendapatkan apa yang ingin dicapai (Jackson & Sorensen, 2009). Morgenthau (1962), dalam artikelnya berjudul *A Political Theory of Foreign Aid* mencoba mengembangkan tipologi dari bantuan luar negeri. Ia mengidentifikasi lima tujuan kebijakan bantuan luar negeri, yaitu: military, prestige, humanitarian, economic, dan subsistence. Tujuan dari tipologi tersebut adalah mengorganisasikan kompleksitas kebijakan yang di labeli dengan nama "foreign aid". Realis berpendapat bahwa tujuan utama dari bantuan luar negeri adalah bukan untuk menunjukkan suatu idelaisme abstrak dari kepedulian kemanusiaan, tetapi untuk proyeksi kekuatan nasional, juga merupakan komponen penting bagi kebijakan keamanan nasional.

Bantuan luar negeri tidak hanya dikonseptualisasikan untuk tujuan kebijakan keamanan dan pembangunan, Tomohisa Hattori (2001:633) mencoba mengkonseptualisasikan bantuan luar negeri dalam konteks Hubungan Internasional yang lebih sistemik, memusatkan perhatian pada sifat dan kondisi hubungan sosial utama yang terlibat dalam praktik bantuan luar negeri dan kemudian menentukan fungsi dan dampaknya. Tomohisa Hattori (2001:635) mendefinisikan bantuan luar negeri adalah simbol kekuatan politik (symbolic power politics) antara donor dan penerima. Praktek bantuan mengubah dominasi material dan subordinasi menjadi isyarat kekuasaan suatu negara atas kelompok ataupun negara lain. Penstudi menyatakan adanya rekonseptualisasi dari tujuan pemberian bantuan itu sendiri, yaitu hubungan pemberian bantuan antara donor dan penerima dengan menentukan secara sistematis kondisi dan sifat materialnya dan membedakannya dari praktik lain. Hasilnya adalah konsep baru bantuan

luar negeri sebagai bentuk pemberian (foreign aid as a form of giving), Bantuan luar negeri sebagai jenis alokasi sumber daya (foreign aid as a type of resource allocation), ataupun bantuan luar negeri sebagai dominasi simbolis atau praktik menandakan hierarki sosial (foreign aid as symbolic domination). Dari perspektif realis yang mengatur berbagai kebijakan bantuan mulai dari penghapusan program bantuan dan pemberian bantuan terhadap dukungan yang setara, tujuan kemanusiaan umumnya dianggap naif. Bantuan secara minimal dipandang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat penerima. Jika efeknya diidentifikasi lebih jauh, keuntungan pemberian bantuan dipandang dengan signifikan berdasarkan efek yang tidak langsung seperti pengaruh politik negara donor sebagai bentuk dominasi (Belle, 2004:144).

Hubungan Internasional secara umum dilihat sebagai perihal yang konfliktual dan kebijakan negara sebagai self-serving sesuai kebutuhan negara. Realis begitu menggaungkan "good interm of interest than morality" dari asumsi tersebut dapat diartikan bahwa bantuan luar negeri merupakan hal yang tidak terpisahkan dari masalah power dan dominasi. Politik adalah faktor yang mengatur, bukan faktor insidental yang bisa dilanggar (Belle, 2004:145). Dalam penelitian ini, komponen beberapa bentuk tujuan bantuan luar negeri dan topologi yang dihadirkan Hattori, Belle, dan Morgentau sejalan untuk menjawab kompleksitas dalam menjelaskan keterlibatan Israel terhadap tindakan represif IS atas Druze Suriah yang di labeli dengan nama "foreign aid" dalam bantuan kemanusiaan.

Dari pendekatan realisme dalam memandang bantuan luar negeri ini dirasa peneliti kurang cukup untuk menjelaskan pengambilan kebijakan pemberian bantuan, ada faktor-faktor lain yang memotivasi suatu negara yang melibatkan diri untuk intervensi dalam suatu masalah di negara lain akan tetap mendasarkan pengambilan keputusannya pada rasionalitas

(Alexis,1991:48). Rasionalitas yang dibangun negara tersebut melihat juga pada ikatan etnis atau kaum yang berpengaruh dalam keputusan politik luar negeri suatu negara dalam menentukan kebijakan untuk membantu (Paquin & Saideman,1997:172). Keputusan dalam pemberian bantuan didalamnya akan ditentukan oleh beberapa motivasi, yaitu motivasi bersifat afektif dan instrumental (Carment,2009:66). Motivasi instrumental yang menetapkan ikatan dari kaum berpengaruh dalam pengambilan kebijakan negara terutama melalui publik domestik, yaitu tekanan publik dan konstituen, karena dalam sistem politik yang demokrasi, konstituen berperan penting dalam perpolitikan melalui dukungan suara mereka terhadap partai yang sedang berkuasa (Saidemen,2001:22). Disini peneliti berusaha melihat motivasi yang cenderung menekankan pada motif instrumental dari Israel. Dalam motivasi instrumental Israel, akan dipengaruhi dengan ikatan suatu kaum yang mempengaruhi politik domestik melalui konstituen di Israel. Maka dari itu diperkuat dengan tambahan teori, merujuk pada hal yang mengambil porsi politik dalam inkrementalisme birokratis.

Teori Bureaucratic Incrementalist atau Inkrementalisme Birokratis memiliki asumsi bahwa bantuan luar negeri merupakan suatu kebijakan publik, produk, dan politik domestik yang melibatkan opini publik. Kemudian termasuk juga kelompok kepentingan serta institusi pemerintah yang secara langsung terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang mempromosikan kepentingan nasional melalui agenda politik. Tipologi yang ada dengan tujuan dikejanya negara donor dalam lingkup kepentingan, antara lain kombinasi dari tujuan kemanusiaan geopolitik, ideologi, kepentingan komersil, masalah lingkungan, dan faktor lain dalam politik domestik yang mengikuti. Inkrementalisme Birokratis merupakan teori pembuatan kebijakan publik, yang menurut teori ini, kebijakan dihasilkan dari proses interaksi dan

adaptasi bersama antara multiplisitas aktor yang menganjurkan nilai yang berbeda, mewakili kepentingan berbeda, dan memiliki informasi berbeda dengan inkrementalisme dan ideal pengambilan keputusan yang rasional (Hayes,2013). Dalam sebuah keadaan krisis, Allison (1971:122) berpendapat bahwa hanya ada sedikit orang dalam birokrasi yang akan terlibat dalam pengambilan keputusan yang krusial dan memiliki konsekuensi yang berisiko selain diluar opini publik. Ia menekankan bahwa setiap anggota dari team pengambil keputusan tersebut akan mengharapkan dan mengambil posisi yang nantinya akan melindungi dan mewakili nilai kepentingan dari partai atau departemen yang direpresentasikan. Dan kemudian kepentingan inilah yang akan membentuk sebuah kebijakan. Sehingga jumlah hasil pemungutan suara dalam pemilihan umum juga menjadi faktor penentu yang membuat suatu partai dapat merepresentasikan kebijakan yang akan diambilnya.

Argumentasi mengenai birokrasi politik sendiri dikembangkan sebagai bagian dari reaksi terhadap aktor rasional dalam sebuah bentuk proses aksi-reaksi dalam domestik (Halperin,1974:105-6). Kemudian Inkrementalisme pertama kali dikembangkan tahun 1950 oleh Charles E. Lindblom. Inkrementalisme menekankan pluralitas aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan memprediksi bahwa pembuat kebijakan akan fokus pada perubahan bertahap dan bukan dilakukan secara langsung dalam skala besar. Inkrementalisme telah berhasil diterapkan untuk menjelaskan pembuatan kebijakan dalam negeri, pembuatan kebijakan luar negeri, dan penganggaran publik. Publik membawa dampak pada pemerintah dengan sebutan fragmentasi sosial, asumsinya adalah tidak ada aktor tunggal yang memiliki informasi yang memadai untuk membuat keputusan kebijakan yang rasional. Adapun efek dari gejolak publik atau tuntutan publik terhadap pembuatan kebijakan yang sangat

mempengaruhi kebijakan negara baik didalam maupun keluar, termasuk dalam hal pemberian bantuan luar negeri yang dipengaruhi argument dan keputusan domestik (Hayes,2013).

Sebagai bagian dari kelanjutan bentuk analisis terhadap pengambilan keputusan dalam wilayah kebijakan publik negara juga dapat dilihat menjadi suatu rangkaian dan upaya pertahanan wilayah dalam balutan bantuan luar negeri. Pengambilan kebijakan suatu negara dalam hal pemberian bantuan luar negeri dalam keadaan konflik ini dapat diperkuat dengan menjelaskan pula teori buffer zone dalam sebuah security dilemma. Realisme selalu berfokus pada anarki, power, dan hasil dari security dilemma sebagai elemen yang paling krusial mendefinisikan politik Internasional (Belle,2004:144-6). Pemikir realisme klasik seperti Machiavelli, mengemukakan bahwa penguasa suatu negara memiliki tanggungjawab penuh atas kelangsungan hidup setiap warga negaranya. Penguasa berperan besar dalam memperjuangkan kepentingan negaranya dalam percaturan politik internasional melalui kebijakan luar negeri yang dimainkan (Jackson & Sorensen,2009). Kurang menyeluruhnya struktur politik yang dapat melindungi yang lemah dari yang lebih kuat, bahkan keberadaan sebuah negara selalu terancam di lingkungan politik, sehingga keamanan harus menjadi perhatian utama dan mendorong jalannya sistem yang dinamik beserta aktor yang mengikutinya. Sejalan dengan pendekatan realisme, pilihan kebijakan luar negeri termasuk alokasi foreign aid, merupakan pilihan strategis yang difokuskan untuk mengejar keamanan melalui power yang dimiliki negara. Berkaitan dengan dilema keamanan, program bantuan harus dirancang sedemikian rupa terutama untuk memfasilitasi kepentingan negara donor. Bantuan dapat digunakan untuk mengamankan sekutu baru atau layaknya membentuk proxy, sebuah kepentingan perpanjangan tangan apabila terjadi sesuatu. Selain itu dapat

juga diarahkan kepada sekutu yang ada, meningkatkan tingkat komitmen, kekuatan, atau stabilitas internal negara. Oleh karena itu bantuan menjadi perpanjangan kebijakan negara dalam dilema keamanan (Belle,2004:9).

Dilema keamanan, juga disebut sebagai model spiral, istilah yang digunakan dalam hubungan internasional dan mengacu pada situasi di bawah anarki, (Herz,1950:159-179) tindakan oleh sebuah negara yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanannya, seperti meningkatkan kekuatan militernya, berkomitmen untuk menggunakan senjata atau membuat aliansi, dapat menyebabkan negara lain merespons dengan tindakan serupa, menghasilkan ketegangan yang meningkat yang menciptakan konflik, bahkan ketika tidak ada pihak yang benar-benar menginginkannya (Jervis,1978:181). Pada saat yang sama Herbert Butterfield (1951) dalam (Fonseca & Gamarra,2017:183-202) menggambarkan situasi dalam hubungan manusia, namun menyebutnya sebagai "absolute predicament and irreducible dilemma".

Menurut John Herz (1950 dalam Tang,2011), dilema keamanan adalah gagasan struktural di mana upaya swadaya negara cenderung untuk menjaga kebutuhan keamanan, terlepas dari niat, untuk menimbulkan keresahan yang meningkat bagi aktor lain karena masing-masing menafsirkan tindakannya sendiri sebagai tindakan defensif dan tindakan aktor lain berpotensi mengancam. Kaufmann (1996 dalam Tang,2011:518-9) mendefinisikan dilema keamanan secara struktural sebagai situasi di mana keamanan setiap negara membutuhkan keresahan orang lain. Dilengkapi oleh Posen (2008, dalam Tang,2011:518) bahwa teori dilema keamanan dapat diterapkan dengan baik untuk memahami konflik etnis dan pendominasian di bawah anarki yang muncul. Mendefinisikan dilema keamanan sebagai usaha sebuah negara yang dapat memicu sebuah reaksi

meskipun tidak memiliki kecenderungan ekspansionis.

Hubungan kausalitas dilema keamanan mencakup beberapa aspek pokok (1) sumber utama dilema keamanan adalah sifat anarkis dari politik internasional (2) di bawah anarki, negara tidak dapat memastikan tujuan dan masa depan masing-masing, karena niat yang mudah berubah, (3) dilema keamanan tidak disengaja, hanya menginginkan keamanan tanpa bermaksud untuk mengancam pihak lain. Artinya, negara tersebut adalah negara realis yang defensif (4) karena ketidakpastian tentang maksud masing-masing dan ketakutan, menjadikan negara-negara beralih ke akumulasi kekuatan sebagai alat pertahanan yang bersifat ofensif, (5) dinamika dilema keamanan sering mengarah pada situasi spiral yang tidak diinginkan seperti memburuknya hubungan, perlombaan senjata, hingga perang (6) cenderung membuat beberapa langkah untuk meningkatkan keamanan seperti mengumpulkan kemampuan ofensif, lebih banyak kekuatan tetapi kurang keamanan (7) tingkat keparahan dilema keamanan dapat diklasifikasikan oleh faktor fisik misalnya: geografi dan distribusi kekuasaan asimetris serta faktor psikologis sosial (Tang,2011:516-8). Karena security dilemma juga mencakup mengenai wilayah atau faktor fisik geografis, sebuah proses aksi-reaksi yang menyertainya dapat diperluas ke dalam bagian zona penyangga (buffer zone) yang menyebabkan musuh mengalami perluasan ke zona lainnya atau adanya upaya penyelamatan (Tang,2011:518).

### **Bantuan Luar Negeri Israel Sebagai Bentuk Dominasi Simbolik**

Beberapa Provinsi yang menjadi tempat tinggal kaum Druze di Suriah yaitu; Halab, Idlib, Al-Ladhiqiyah, Hamah, Tartus, Hims, Dimashq, Deraa, As-Suwayda, Al-Qunaitra, dan Al-Madamiyeh. Sebagian besar kaum Druze memiliki kesamaan yaitu kepatuhan yang kuat terhadap agama

heterodoks non-Muslim mereka, banyak juga di antara ritus yang dirahasiakan dengan ketat (DebkaNews,2015). Hingga saat ini di area-area tersebut, Suriah memiliki komunitas Druze terbesar, dengan populasi antara 500.000-800.000. Ketika Druze Suriah mendapatkan serangan oleh IS, penentuan sikap diambil oleh Israel dalam bentuk-bentuk bantuan luar negeri. Israel memberi isyarat kesiapan pada hari Selasa 16 Juni 2015 untuk campur tangan ketika Druze Suriah mulai mendekat di jalur gencatan senjata di Dataran Tinggi Golan, dan resmi mendeklarasikan bantuannya pada bulan Juni 2016. Kemudian deklarasi Militer Israel yang berjanji akan menjamin keamanan desa-desa Druze Suriah diperjelas dan diperkuat pada hari jumat tanggal 3 November 2017 (Khoury,2017).

Salah satu indikator dari dominasi ini adalah semakin besar ketergantungan semakin besar pula dominasinya (congealed power). Druze di Suriah sedang mengalami ketergantungan banyak kebutuhan alokasi material untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya selama konflik yang masih terus terjadi. Israel memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Druze Suriah yang terjebak dalam pertempuran antara pasukan Presiden Bashar Al-Assad, pemberontak, dan Jihadis di dekat Dataran Tinggi Golan, khususnya di sekitar gunung Hermon, Khader, Hawran, Arneh, Dara, dan As-Swaida termasuk juga di Provinsi Idlib. Militer Israel mengungkapkan lingkup proyek bantuan kemanusiaan yang dilakukan Israel disebut juga Operasi Good Neighbor. Ada tiga jenis bantuan utama sebagai bagian dari Good Neighbor Operation sebagai bentuk alokasi barang dan material demi kelangsungan hidup, pertama adalah medis, infrastruktur, dan bantuan sipil (IDF,2016). Proyek bantuan tersebut bergantung pada tingkat kerjasama yang luar biasa antara pemerintahan Israel, pemimpin militer di Golan dengan dokter Suriah dan pemimpin Desa Druze



Suriyah untuk mengukur kebutuhan (Kershner,2017).

Dominasi simbolik mengacu pada kemampuan negara untuk mempertahankan kontrol terhadap suatu entitas tertentu. Ini terjadi dalam ranah Druze yang memang sedang mengalami konflik kemanusiaan. Prinsip simbolis melalui perilaku dalam kontak sosial di masyarakat dalam bertindak, pendidikan, dan sumber daya diatur sedemikian rupa oleh Israel agar memajukan negara Israel itu sendiri (Haryatmoko,2010). Sekolah dan kebijakan pendidikan telah menjadi lokasi utama perjuangan untuk masa depan Israel. Kebijakan pendidikan Israel telah menjadi alat penting kontrol sosial dan politik atas orang-orang Suriyah di Golan. Sebagian besar total populasi terdiri dari generasi muda, oleh karena itu, sistem sekolah menjadi salah satu penggerak di desa-desa Golan. Otoritas Israel telah mengarahkan kebijakan pendidikan untuk menanamkan ketaatan dan kesetiaan Druze kepada negara Israel. Momen perang sipil Suriyah dijadikan acuan utama sebagai kontrol sosial yang semakin kuat. Israel berharap agar Druze Suriyah yang diberi bantuan akan mematuhi peraturan Israel atas dasar kepentingan komunal, dan nantinya Druze di perbatasan Suriyah bisa membenarkan aneksasi prospektif wilayah dengan alasan self-determination bagi penduduk setempat (Tarabieh,1995:43). Dari sektor ekonomi Israel memanfaatkan momen perang sipil untuk mengalirkan hasil perkebunan Druze Suriyah hanya ke Israel bukan ke Damaskus (New York Times,2013). Pendudukan wilayah dan keberadaan militer disuatu kawasan bisa menjadi satu indikator dominasi itu sendiri. Dari bidang militer ini, banyak juga upaya dari pemuda-pemuda Druze di Israel yang sengaja mulai mengatur kader pertahanan diri mereka sendiri, mengumpulkan sesi latihan akhir pekan dalam taktik senjata ringan yang diajarkan oleh tentara Israel yang tidak bertugas, agar siap menyeberang perbatasan untuk membela kelompok

agama mereka di Suriyah (Samaha,2015). Israel mengirimkan beberapa truk yang mengangkut tentara (Home Command Soldiers) untuk menjaga perbatasan antara dataran tinggi Golan dan Suriyah selatan tepatnya sekitar Gunung Hermon (khususnya Khader dan Arneh) serta membantu komunitas Druze Suriyah yang mengalami penderitaan (Kershner,2017). Milisi Druze di As-Swaida juga telah berkembang menjadi sekitar 1.000 pejuang karena mendapat bantuan dari Israel dan menerima dana untuk membeli senjata (Balanche,2016). Di perbatasan Golan, IDF membuat semacam emergency procedure untuk melindungi Druze Suriyah di Majdal Shams, Khader, dan Arneh yang begitu dekat dengan Golan. Komando depan dari IDF membuat selebaran dan pengaturan kontijensi yang telah disebarluaskan keseluruh warga diperbatasan (Tarnopolsky,2014).

Indikator selanjutnya adalah terciptanya usaha naturalisasi atau suatu upaya untuk masuk sebagai warga negara akibat dari ketertarikan jaminan hidup dan ketidaksetaraan taraf hidup disuatu wilayah. Sebuah alokasi material yang mengandung unsur memberi dari Israel kemudian disambut baik oleh Druze Suriyah sebagai penerima yang lama kelamaan menjadi unsur naturalisasi karena ketidaksetaraan derajat dari berbagai hal, yaitu kemampuan, hierarki, kuasa dll. Unsur memberi bantuan menghasilkan daya tarik bagi para pemimpin agama Druze. Hal tersebut oleh Israel diaplikasikan dalam bidang non-material yang berkaitan dengan moral, kontak sosial, dan support dialog bersama yang mengubah mind-set para petinggi Druze, kemudian nantinya bisa setia pada Israel sepenuhnya (Hattori,2001:641). Akhirnya kontrol sosial mudah diraih oleh Israel. Suara Israel untuk Suriyah nantinya bisa tersalurkan melalui pemimpin-pemimpin Druze Suriyah, yang diharapkan bisa menjadi aset bagi masa depan Israel dengan menjadikan Druze Suriyah sekutunya.

## **Druze Israel: Tekanan Publik dan Pengaruhnya di Pemerintahan Israel**

Dengan melihat perkembangannya dari tahun ke tahun, komunitas Druze Israel adalah minoritas yang cukup diperhitungkan oleh Israel. Logikanya apabila Druze Israel ini aktif diberbagai aspek disejumlah distrik dan memiliki keunggulan dibanding dengan minoritas Arab yang lain dimata Israel, maka tidak heran apabila mereka berani

mengambil tindakan tekanan publik ketika mendapatkan masalah dan dalam posisi yang sedang terjepit. (ReformJudaism,2017). Tekanan publik yang dilakukan adalah demonstrasi bertahap. Gelombang pertama ratusan anggota minoritas Druze Israel berdemonstrasi di Yarka Israel utara pada hari Minggu 21 April 2013, meminta masyarakat Israel dengan segenap pemerintahnya untuk membantu agamawan mereka di Suriah (Reback,2015).

### **Gambar 1: Druze Israel dari Desa Majdal Syams Melakukan Demonstrasi untuk Menudukung Saudara-Saudara Druze Suriah Mereka di Israel Utara Pada Tanggal 15 Juni 2015**



*Sumber: The Times Israel, 2006*

Kemudian berlanjut dengan 200 orang Druze Israel mengadakan demonstrasi di Majd al-Shams, juga menyerukan Israel untuk membantu saudara-saudara Suriah mereka (Mitchell,2015). Demonstrasi berlanjut di kota Daliat Al-Carmel pada tanggal 14 Juni 2015 oleh kaum Druze yang berkumpul dari berbagai kota, dengan mengerahkan sekitar 2000 personil. Populasi Druze di daerah tersebut telah meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk dengan lantang mendeklarasikan bantuan secara resmi (Wood,2015). Masih di tahun 2015, terjadi gelombang dua demonstrasi setelah adanya penyerangan di Khader. Banyak Druze yang berusaha melewati perbatasan Dataran Tinggi Golan untuk membantu penyerangan melawan jihadis, sehingga hal tersebut membuat IDF berusaha untuk mencegah dan melindungi agar

mereka tidak melewati batas (Amir,2017).

Melalui berbagai opini dari kalangan yang berbeda dipemerintahan, penstudi, pejabat tinggi yang sudah purna tugas maupun masih bertugas, dan terutama petinggi Druze, hal tersebut bisa menjadi pertimbangan tersendiri bagi Israel (Benjamin Netanyahu) untuk memutuskan pemberian bantuan. Ada peran yang berpotensi lebih besar untuk menghadapi keadaan di Suriah. Bukan hanya sekadar pada aspek yang berdekatan dengan lingkungan militer dan keamanan, namun juga adanya isu dengan dimensi politik dan moral yang jelas, yang tidak dapat diputuskan oleh tentara, namun harus diputuskan di dalam ruang publik dan politik. Keterlibatan militer jelas membawa harga tersendiri bagi pemberian

bantuan, namun IDF juga akan berhasil mewujudkan tujuan bantuan dengan adanya institusi yang menetapkan sasaran yang tepat dengan kata lain pemerintah Israel (Hazony,2015).

Momentum ini disertai dengan kampanye yang dilakukan oleh Netanyahu, Janji dan pertimbangan Israel mengenai bantuan yang akan diberikan kepada Druze di Suriah ini disebutkan dalam kampanyenya sebelum pemilihan umum untuk Knesset ke-20 (Reback,2015). Dan secara seksama, kerusuhan yang terjadi menimpa Druze ini dijadikan acuan sebagai kebersamaan Druze dan Israel sebagai perjuangan melawan radikal Islam (Berman,2014).

*“You are our very flesh. You are an organic part of Israeli society. Your heroic policemen and soldiers have fallen in order to defend the state and all its citizens, but we will defend your rights and your security, and this is our fight against radical Islam,”*  
(Berman,2014).

Dilihat dari partai Yahudi, masyarakat Druze-lah yang masih memilih dengan suara terbanyak bagi Likud di antara masyarakat Arab dan Druze, sebanyak 6,6 persen lebih unggul untuk voting suara. Hal tersebut disebabkan wilayah utara Israel termasuk daerah yang banyak ditinggali kaum Druze. Dari 2013 hingga 2015 hanya 18 persen pemilih Druze memilih partai-partai Arab dan Joint List dalam tiga pemilihan terakhir karna mengutamakan untuk memilih partai Yahudi-Zionis. Mayoritas Druze mengatakan bahwa mereka memilih partai-partai Zionis, hampir 56 persen dari 100 persen (Omar,2016).

### **Dampak Netralitas Druze Terhadap Dilema Keamanan Israel Atas Tindakan Represif IS di Dekat Perbatasan Dataran Tinggi Golab**

Kenetralan kaum Druze Suriah dalam menentukan posisinya di perang sipil Suriah justru menjadi celah menimbulkan ketertarikan bagi teroris

seperti IS untuk menyerang hingga perbatasan Israel-Suriah. Kelompok ini menjadi aktor strategis yang akibatnya membawa aktor besar pada akhirnya mengalterasikan fokus (Abdel-Samad,2016). IS sangat berpotensi menyerang Israel, selain alasan sifat dasar dari IS sendiri yang fanatik, entitas xenophobic, melantangkan anti-pluralis, dan anti-liberal ini, diwaktu yang sama IS ingin menggunakan teritorinya sebagai basis untuk menyerang musuh yang dekat, dengan fokus pada negara-negara bagian barat di Timur Tengah, dan selanjutnya berkembang memperluas jangkauannya lebih jauh (Herzog,2015). IS merasa menemukan ruang operasional yang relatif bebas di Suriah Selatan, dan ini mewakili ancaman permanen bagi Israel (Haaretz Editorial,2017). Menyerang Israel akan memiliki nilai lebih bagi IS, terutama mengingat kemunduran terakhir IS ditempat-tempat penyerangan lain (Balanche,2016). Pada akhirnya Israel terus meluncur ke depan perbatasannya dengan Suriah, berdampingan dengan dalih melindungi komunitas Druze di Desa Khader, Deraa, dan Sweida dengan sesekali melakukan penyerangan pada sebuah konvoi senjata yang dibuat oleh jihadis IS (Haaretz Editorial,2017).

Zona penyangga di dekat Dataran Tinggi Golan telah melindungi Israel dan Druze secara efektif dari spillover kekerasan di Suriah. Mempertahankan sebuah koridor keamanan enam mil di sepanjang pinggiran utara untuk mencegah serangan dari jihadis. Karena adanya faktor destabilisasi kawasan, Israel ingin menjaga stabilitas kawasan di perbatasan Dataran Tinggi Golan dengan selatan Suriah (DebkaNews,2015). Dari segi pasukan, banyak juga Druze yang bertugas di unit tempur Israel yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan Golan dan mengangkat senjata untuk membela Jabal Druze (DebkaNews,2015). Buffer zone ini menjadi penting ketika Israel berhasil menggunakan kepentingan pemberian bantuan kemanusiaan sebagai bentuk buffer. Pola-pola yang dilakukan Israel dalam memberlakukan

zona penyangga cukup menarik, selain menggunakan penempatan iron dome, tentara penjaga, dan berbagai tahapan 3 fase safe zone, no-fly zone, dan de-escalation zone yang secara keseluruhan mencakup humanitarian zone (TheIntercept,2018).

### **Kesimpulan**

Jurnal ini dilakukan berdasarkan awal perang sipil di Suriah pada tahun 2011 memberikan tekanan pada minoritas untuk memihak dalam konflik. Namun IS sejak tahun 2013 menghadirkan ancaman eksistensial bagi kelompok minoritas di Timur Tengah, termasuk Druze. Komunitas Druze di Suriah menghadapi dilema posisi politik dan militer apa yang harus diambil. Druze menemukan diri mereka dihadapkan pada satu sisi dengan rezim yang tidak begitu peduli apabila kaum mereka menghadapi tekanan, dan di sisi lain dengan IS sebagai kelompok jihad Salafi yang mengklaim Druze adalah bid'ah dan perlu penanganan khusus, bisa dengan pembunuhan atau pernyataan konversi. Pada akhirnya Druze memutuskan bahwa pilihan terbaik mereka adalah tetap netral dalam konflik.

Posisi Druze yang netral sebagai peran minoritas dalam konflik Suriah yang kemudian menimbulkan ketertarikan pihak lain untuk ikut bermain dalam perang sipil tersebut. Kelompok ini menjadi aktor strategis yang akibatnya membawa aktor besar pada akhirnya mengganti fokus mereka. Kebijakan Israel, yang awalnya didasarkan pada gagasan Israel sebagai "passive onlooker" dan kemudian berubah menjadi "good neighbor," tercermin dalam intervensi yang jauh lebih aktif di dekat perbatasan Suriah. Prinsip organisasinya menggabungkan aktivitas kemanusiaan dan militer: membangun jembatan di satu sisi, dan memaksimalkan kepentingan Israel di sisi lain. Ketika Druze Suriah mendapatkan serangan oleh militan Islam (Islamic State) penentuan sikap diambil oleh Israel dalam bentuk-bentuk

bantuan luar negeri khususnya bantuan kemanusiaan. Mengingat situasi yang berubah dengan cepat di daerah perbatasan Israel-Suriah.

Tulisan ini mengkombinasikan pandangan realisme dalam Hubungan Internasional yakni mengenai power dan dilema keamanan dengan teori inkrementalisme birokratis yang menjelaskan bahwa bantuan luar negeri dipengaruhi oleh tekanan dan opini publik. Keduanya digunakan untuk menjawab mengapa Israel pada akhirnya mau membantu kaum minoritas Druze di Suriah untuk pertama kalinya di tengah-tengah perang sipil Suriah yang mendesak mereka untuk menentukan posisinya. "I have given instructions for everything needed and what to do," ungkap Benjamin Netanyahu Perdana Menteri Israel. Druze merupakan minoritas yang cukup diperhitungkan di Israel dengan berbagai kecakapan yang dimiliki. Maka dari itu tidak heran apabila muncul reaksi pergerakan tekanan publik dalam negeri yang juga menjadi satu pertimbangan khusus untuk merangkul kaum Druze agar mereka tetap aman dari tindakan represif jihadis muslim (IS). Walaupun tetap pada akhirnya Israel sendiri khawatir akan pergerakan IS yang begitu cepat hingga dekat dengan perbatasan negaranya. Situasi ini melahirkan suatu dilema keamanan dengan konsep yang tidak seperti pada umumnya hanya state to state tapi juga bisa state to non-state. Dari sini dapat dilihat bahwa Israel mengalami dilema keamanan karena IS bisa sewaktu-waktu melintasi perbatasan sehingga nantinya terjadi spillover effect. Secara sederhana, Israel ingin menjaga perbatasannya agar tetap aman, dan dengan cara pemberian bantuan luar negerilah Israel masuk ke desa-desa Druze untuk memberikan penguasaan wilayah terlebih dahulu dari IS. Tulisan ini sekaligus membuktikan bahwa melalui bantuan luar negeri, Israel memainkan peranan penting dalam perang Sipil di Suriah walau tidak secara langsung jump over troops di wilayah Suriah untuk berperang seperti Rusia dan AS.

Berdasarkan tiga bab pembahasan yang telah dituliskan peneliti diatas, terdapat beberapa kesimpulan penting yang diekstraksikan dari sintesa asumsi dan fenomena empiris yang terjadi. Pertama, bantuan luar negeri berupa bantuan kemanusiaan, transfer uang, dan militer, bisa dikaitkan dengan upaya dari bentuk dominasi simbolik (symbolic domination). Dominasi simbolik mengacu pada kemampuan negara untuk mempertahankan kontrol terhadap suatu entitas tertentu. Menyangkut ketergantungan suatu kaum yang kemudian akan menimbulkan kesenjangan pada suatu entitas yang lebih kuat kepada entitas yang lebih lemah. Dalam hal ini Negara Israel melakukan sebuah dominasi simbolik terhadap kaum minoritas yaitu Druze di Suriah. Adanya konflik perang sipil di Suriah dijadikan sebuah momen bagi Israel untuk masuk kedalam setiap irisan-irisan aspek kehidupan Druze Suriah. Bentuk dominasi simbolik dari jurnal ini dilihat dari beberapa aspek. Mulai dari pendidikan Israel yang bisa menjamin pemuda-pemudi Druze mendapatkan pendidikan yang layak daripada di Suriah. Banyak siswa Druze Suriah yang membuat aplikasi permohonan untuk dapat belajar di Israel dibanding di Suriah. Kemudian juga bantuan alokasi barang dan material kelangsungan hidup layaknya medis, infrastruktur, dan bantuan sipil yang disebut dengan Good Neighbor Operation. Dalam bidang ekonomi pula Israel berusaha mengalirkan hasil penjualan perkebunan buah Druze Suriah kepada Israel. Penempatan militer di wilayah-wilayah Suriah selatan terutama Khader, Jabal Druze Swaida, dan Deraa juga menjadi aspek penting bahwa dominasi terjadi di desa-desa Druze. Bukti kontrol kontak sosial layaknya support moral, dialog bersama, hingga upaya perubahan opini Druze Suriah, yang begitu kuat tersebut pada akhirnya banyak membuat lonjakan penduduk di Israel. Pemberian bantuan sama besarnya dengan pengaruh pertunjukan simbolis, karena ini

dijadikan mode perlindungan strategis bagi Israel.

Kedua, tekanan publik dari Druze Israel yang telah terjadi sejak tahun 2013 ketika hubungan IS dan Druze Suriah mulai memanas hingga tahun 2017, memiliki efek yang berdampak besar pada keputusan Israel untuk membantu Druze Suriah yang terkena serangan oleh jihadis muslim (IS) di era Benjamin Netanyahu periode 2013-2015. Tekanan publik yang terjadi yakni dalam bentuk beberapa kali gelombang demonstrasi yang dilakukan warga Druze Israel. Selain itu pernyataan publik dari berbagai kalangan memperkuat desakan untuk terciptanya dialog diantara pemerintah Israel dan beberapa petinggi Druze salah satunya Mowafaq Tarif. Untuk melihat lebih jauh pembuktian keberpengaruhannya Druze Israel dalam terciptanya pemberian bantuan terhadap Druze Suriah ini, peneliti juga melihat dalam ruang pemerintahan negara Israel sendiri, dari partai Likud yang mempertahankan konstituennya. Hal ini berhubungan erat dengan janji kampanye sebelum pemilu Knesset ke-20 yang diberikan Netanyahu kepada kaum Druze. Terbukti setelah janji tersebut, akumulasi suara Druze ke partai Likud paling kuat dibandingkan dengan minoritas Arab yang lain di Israel. Peristiwa yang menimpa Druze ini dijadikan acuan Israel untuk bersama memerangi radikal Islam (IS). Untuk pemilu ke-20 ini suara Druze yang setia dengan partai Yahudi masih sangat besar 80,9 persen dibandingkan dengan minoritas yang lain. Meskipun saat itu partai Arab sedang rising tergabung dalam Join List. Kemudian diselaraskan dengan hasil pemilu untuk Likud dengan presentase sebanyak 6,6 persen dibandingkan dengan minoritas Arab yang lain. Support dalam suara pemilu menjadi hal yang bisa dilihat sangat berkorelasi dengan antusiasme Druze Israel untuk melanggengkan partai Likud agar dapat mengakomodasi kebijakan membantu kaum Druze, dan kemudian memang benar direalisasikan pada bulan Juni 2016. Adanya penunjukkan Ayoub Kara sebagai minister without portfolio

untuk mengakomodasi suara Druze agar lebih efektif lagi kedepannya lantas menjadi pembuktian adanya penarikan suara dari Druze bagi Likud dan nilai Druze bagi Benjamin Netanyahu dianggap kaum minoritas yang penting. Hal tersebut membuktikan adanya interkoneksi yang tinggi antara Druze Israel dan Pemerintah Israel.

Ketiga, situasi kaum minoritas Druze yang menerima tindakan represif oleh IS ini tidak bisa dipungkiri juga mengganggu perbatasan Israel dan membuat dilema keamanan di daerah perbatasan. Realitas yang berubah dengan cepat di sisi lain perbatasan menyerukan pemikiran kembali kebijakan Israel. Milisi pro-rezim yang mulai meninggalkan Suriah selatan, kontingen besar dari Pasukan Pengungsi PBB (UNDOF) menarik diri dari zona demiliterisasi, dan reorganisasi para pemberontak yang tersisa di daerah Suriah selatan, menimbulkan dilema baru bagi strategi intervensi Israel. Dalam sebuah dilema keamanan Israel memilih mengaplikasikan sebuah buffer zone untuk menjaga situasi diperbatasan agar tetap aman. Buffer zone ini mengandung tiga jenis fase yang dikombinasikan dalam humanitarian aid zone. Fase zona pertama yang disebut dengan "safe zone" yang berjarak hingga 45 kilometer dari perbatasan. Fase zona kedua, menjamin pengaturan keamanan yang mencakup penegakkan zona larangan terbang "no-fly zone", dengan demarkasi zona keamanan seluas 25 kilometer yang membentang di sepanjang perbatasan Suriah dengan Israel, Libanon, dan Yordania. Zona ketiga diperpanjang hingga masuk kawasan Suriah sebagai "de-escalation zone," yang nantinya disugestikan akan menjadi entitas Suriah yang baru dan aman kemudian berkembang secara bertahap. Pembentukan zona penyangga ini menjadi penting ketika Israel berhasil

memberlakukan tindakan preemtif bukan dengan intervensi militer secara langsung, menggunakan kepentingan pemberian bantuan kemanusiaan sebagai bentuk buffer (berupa penguasaan wilayah melalui bantuan). Israel berinisiatif terlebih dahulu menerjunkan bantuan bagi Druze diperbatasan agar beberapa wilayah seperti Deraa, Gunung Hermon, Khader, dan Sweida steril dari IS.

Akhirnya setelah melakukan penelitian yang didasarkan pada konten analisis berbagai literatur yang ada, peneliti dapat menegaskan bahwa hipotesis penelitian ini terkonfirmasi benar adanya. Israel membantu kaum Druze di Suriah dikarenakan beberapa alasan, (1) yang awalnya bantuan luar negeri berupa bantuan kemanusiaan ini oleh Israel dijadikan sebuah upaya symbolic domination, (2) lalu memang pada kenyataannya Israel didorong oleh publik Druze Israel yang mendukung untuk reaksi penyelamatan bagi saudara Druze mereka di Suriah, sebab Druze juga merupakan minoritas yang cukup diperhitungkan di Israel. Kemudian (3) disisi lain Israel mengalami dilema keamanan karena ternyata penyerangan kaum minoritas Druze ini membuat IS berdiri diperbatasan. IS dinilai membawa ancaman yang nyata bagi Israel, sehingga pembuatan buffer zone dirasa keputusan yang tepat. Selanjutnya bagaimana nantiya Israel ini akan menentukan lebih jauh peranya dalam menghadapi gejolak perang sipil Suriah dengan mengamati aliansi-aliansi yang coba mereka buat serta segala pertimbangan resiko dan peluang. Dan kedua, adanya fokus lain seperti Druze policy dan identitas sosial Druze diselaraskan dengan identitas dan kebijakan yang dimiliki Israel bisa menjadi acuan titik awal bagi penelitian lebih lanjut mengenai hubungan Druze Suriah dan Israel.

### **Daftar Pustaka**

[1] Abdel-Samad, Mounah. (2016). "ISIS as an Existential Threat to the Druze: The Struggle for Survival" dalam *Studies in Conflict &*

*Terrorism*. San Diego: San Diego State University.  
[2] Ahmadiya, Syrus, Hafezniab MR, & Bernard Hourcadc. (2013). *Geopolitics of Buffer Spaces: Characteristics of Iran's Buffer*

- Situation Between Great Powers in The Nineteenth and Twentieth Century (AD). a Political Geography Dept., Tehran: Tarbiat Modares University.
- [3] Al-Assilm, Ibrahim dan Slim, Randa. 2015. The Syrian Druze at a Crossroads. [Online] Terdapat dalam <http://www.mei.edu/content/article/syrian-druze-crossroads>. [Diakses pada 22 Maret 2017].
- [4] Allison, Graham T. (1971). *Essence of Decision*. Boston: Harvard University Little, Brown and Company.
- [5] Amir, Noam. (2017). IDF: "Out of commitment to the Druze – prevented the capture of Khader". [Online] Terdapat dalam <http://scofieldinstitute.org/idf-commitment-druze-prevented-capture-khader/>. [Diakses pada 4 Oktober 2017].
- [6] Anon, 2015. IS Menyerang Desa Druze Suriah. [Online] Terdapat dalam <http://www.wartaperang.com/2015/05/negar-a-islam-is-menyerang-desa-druze-suriah.html>. [Diakses pada 1 April 2017].
- [7] Atashi, Zeidan. t.t. The Druze in Israel: The Question of Compulsory Military Service. [Online] terdapat dalam <http://www.jewishvirtuallibrary.org/>. [Diakses pada 23 Maret 2017].
- [8] Balanche, Fabrice. (2016). Druze dan Assad: bedfellows Strategies. <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-druze-and-assad-strategic-bedfellows>. Washington DC: The Washington Institute. [Diakses pada 22 Maret 2017].
- [9] Balanche, Fabrice. (2016). The Druze and Assad: Strategic Bedfellows. POLICYWATCH 2713. [Online] Terdapat dalam <http://www.washingtoninstitute.org>. [Diakses pada 16 Oktober 2017].
- [10] Balanche, Fabrice. (2016). The Islamic State Threat in the Golan Heights. POLICYWATCH 2658. [Online] Terdapat dalam <http://www.washingtoninstitute.org>. [Diakses pada 16 Oktober 2017].
- [11] Balanche, Fabrice. (2016). The Islamic State Threat in the Golan Heights. PolicyWatchAnalysis 2658. [Online] Terdapat dalam <http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-islamic-state-threat-in-the-golan-heights>. [Diakses pada 14 April 2018].
- [12] Balanche, Fabrice. (2016). The Islamic State Threat in the Golan Heights. POLICYWATCH 2658. [Online] Terdapat dalam <http://www.washingtoninstitute.org>. [Diakses pada 16 Oktober 2017].
- [13] Balanche, Fabrice. 2016. Druze dan Assad: bedfellows Strategies. <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-druze-and-assad-strategic-bedfellows>. Washington DC: The Washington Institute. [Diakses pada 22 Maret 2017].
- [14] Balanche, Fabrice. 2016. Druze dan Assad: bedfellows Strategies. <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-druze-and-assad-strategic-bedfellows>. Washington DC: The Washington Institute. [Diakses pada 22 Maret 2017].
- [15] Beehner, Lionel & Meibauer, Gustav. (2016). The Futility of Buffer Zones In International Politics. *Orbis* ISSN 0030-4387 (In Press). London school of Economic and political Science.
- [16] Belle Van, A. Douglas, Jean-Sebastien Rioux, dan David M. Potter. (2004). *Media, Bureaucracies, and Foreign Aid: A Comparative Analysis of the United State, The United Kingdom, Canada, France, and Japan*. New York: Palgrave Macmillan.
- [17] Berman, Lazar. (2014). PM promises major investment in Druze, Circassian towns. [Online] Terdapat dalam <https://www.timesofisrael.com/pm-promises-major-investment-in-druze-circassian-towns/>. [Diakses pada 24 Februari 2018].
- [18] Burawoy, Michael. (2012). The Roots of Domination: Beyond Bourdieu and Gramsci Vol. 46, No. 2. Sage Publications, Ltd. pp. 187-206.
- [19] Burnell, Peter. 1992. "Charity law and pressure politics in Britain: after the Oxfam inquiry" dalam *International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, Vol. 3. Spinger. pp. 311-334.
- [20] Carment, David et al, (2009) "The Internationalization of Ethnic Conflict: State, Society and Synthesis", *International Studies Review*. [Online] Terdapat dalam <http://www.engagingconflict.it/ec/wpcontent/uploads/2012/06/Carment-The-Internationalization-of-Ethnic-Conflict-State-Society-and-Synthesis.pdf> [diakses pada 26 Februari 2018].
- [21] Centre on Religion & Geopolitics. 2014. The Druze: Solidarity and Allegiance in Syria. [Online] Terdapat dalam <http://www.religionandgeopolitics.org/syria/druze-solidarity-and-allegiance-syria>. [Diakses pada 1 April 2017].
- [22] Choufi, Firas. 2013. Syria: ISIS Imposes 'Sharia' on Idlib's Druze. [Online] Terdapat dalam <http://english.al-akhbar.com/node/18002>. [Diakses pada 23 Maret 2017].
- [23] Dermer, Joshua B. 2016. Israeli officials pledge support of Druze community. [Online] Terdapat dalam <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4805726,00.html>. [Diakses pada 1 April 2017].
- [24] Dyah, Dyfty. (t.t.). Tindakan Afirmatif. [Online] Terdapat dalam <https://www.scribd.com/document/106774892/Tindakan-Afirmatif#>. [Diakses pada 22 Maret 2017].
- [25] Fansisco, Afrid. (2016). Islam Druze Minta Tolong Tentara IDF Israel Lindungi Orang-Orang Druze di Suriah. [Online] terdapat dalam <http://www.afrid-fransisco.id/2016/09/islam-druze-minta-tolong-ke-tentara-idf.html>. [Diakses pada 10 Mei 2017].

- [26] Fidler, David P., (2007). "Governing Catastrophe: Security, Health and Humanitarian Assistance". *International Review of the Red Cross*, vol 89, no. 866, June 2007, pp. 247-270.
- [27] Firro, Kais M. 2001. "Reshaping Duze Particularism in Israel" dalam *Journal of Palestine Studies*, Vol. 30, No.3. California: University of California. Pp 40-53.
- [28] Gear, Mary Barnes. (1941). "Role of Buffer States in International Relations," *Journal of Geography*. Volume 40. Pp 81-89.
- [29] Gilpin, Robert. (1987). *The Political Economy of International Relations*. published by Princeton University Press.
- [30] Greif, Adi. 2005. *Druze and Jews*. [Online] Terdapat dalam [http://web.stanford.edu/group/journal/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/Greif\\_SocSci\\_2005.pdf](http://web.stanford.edu/group/journal/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/Greif_SocSci_2005.pdf). [Diakses pada 12 April 2017].
- [31] Haaretz Editorial. (2017). *Israelis Have the Right to Know That They Aren't Being Dragged Into War in Syria*. Hebrew and English newspapers. [Online] Terdapat dalam <https://www.haaretz.com/opinion/editorial/a-front-that-still-requires-proof-1.5627521>. [Diakses pada 14 Agustus 2017].
- [32] Halperin MH. (1974). *Bureaucratic Politics & Foreign Policy*. Washington, DC: Brookings Inst.
- [33] Hannauer, Larry. (2016). *Israel's Interests and Options in Syria*. Rand Corporation Perspective Expert insights on a timely policy issue. Pp1-24.
- [34] Harel, Amos. (2015). *With Druze Facing Possible Massacre in Syria, Israel Is Forced to Take a Stand*. [Online] Terdapat dalam <http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.661971>. [Diakses pada 22 Maret 2017].
- [35] Haryatmoko, Johannes. (2010). *Dominasi penuh muslimat: akar kekerasan dan diskriminasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [36] Hattori, T. (2001) *Reconceptualizing Foreign Aid*. *Review of International Political Economy*, 8(4). Taylor & Francis, Ltd. pp. 633-660.
- [37] Hayes, Michael T. (2013). *Inkrementalisme* [Online] Terdapat dalam <https://www.britannica.com/topic/incrementalism>. Encyclopædia Britannica, Inc. [Diakses pada 2 Mei 2017].
- [38] Hazran, Yusri. (2016). *Between Hammer and Anvil: The Druze Dilemma in Syria*. <http://www.religionandgeopolitics.org/syria/between-hammer-and-anvil-druze-dilemma-syria> [Diakses pada 31 Maret 2017].
- [39] Heinrich, Mark. (2015). *Israel says asked Syrian rebels not to harm Druze*. [Online] Terdapat dalam <http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-israel-druze-idUSKCN0P91GN20150629>. [Diakses pada 30 Mei 2017].
- [40] Heller, Jeffrey dan Kasolowsky, Raissa. (2015). *Syria Crisis Israel Druze*. [Online] Terdapat dalam <http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-israel-druze-idUSKBN00Q29E20150610>. [Diakses pada 1 April 2017].
- [41] Heller, Monica. (1955). *Language Choice, Social Institutions, and Symbolic Domination*. *Language in Society*, Vol. 24, No. 3. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 373-405.
- [42] Henrikson, Alan K. (2002). *Distance and Foreign Policy: A Political Geography Approach*. Vol. 23, No. 4, Sage Publications, Ltd. pp. 437-466.
- [43] Heraclides, Alexis. (1991). *The Self-Determination of Minorities in International Relations*. Portland, OR: Frank Class.
- [44] Herz, John H. (1950). *Idealist Internationalism and the Security Dilemma*. pp. 157-180.
- [45] Herzog, Michael. (2015). *Jihad on the Horizon: The ISIL Threat from an Israeli Perspective*. [Online] Terdapat dalam <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/jihad-on-the-horizon-the-isil-threat-from-an-israeli-perspective>. Britain Israel Communications and Research Centre. [Diakses pada 14 April 2018].
- [46] Herzog, Michael. (2015). *Southern Syria: A New Front for Israel?*. *PolicyWatchAnalysis 2380* The Washington Institute's. [Online] Terdapat dalam <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/southern-syria-a-new-front-for-israel>. [Diakses pada 14 April 2018].
- [47] Investopedia. (t.t.). *What is 'Volatility'*. [Online] Terdapat dalam <https://www.investopedia.com/terms/v/volatility.asp#ixzz58PHZ4LD1>. [Diakses pada 22 Maret 2017].
- [48] Israel News. (2015). *Israel's President voices concern over Syria's Druze community*. [Online] Terdapat dalam <http://www.tv7israelnews.com/israels-president-voices-concern-over-syrias-druze-community/>. [Diakses pada 1 April 2017].
- [49] Jackson, Robert & Georg Sorensen. (2009). *Introduction to International Relations*. Oxford University Press.
- [50] Jackson, Robert & Sorensen, Georg. (2009). *Pengantar Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [51] Jervis, R. (1978). "Cooperation under the Security Dilemma," *World Politics* vol. 30, no.2. pp. 167-174;
- [52] Jervis, Robert. (1978). *Cooperation Under Security Dilemma*. *World Politics* Volume 30, Issue 2. Maryland: Johns Hopkins University Press. pp 167-214.
- [53] JNS. (2015). *Syrian Druze Plight Tests Israel's Policy of Avoiding Involvement in Civil War*. [Online] Terdapat dalam <https://www.breakingisraelnews.com/44138/syrian-druze-plight-tests-israels-policy-avoiding-involvement-civil-war-middle-east/#HB6QGpljaUYPiIH.99>. [Diakses pada 30 Mei 2017].
- [54] K.J. Holsti. (1995). *International Politics: Framework of Analysis*. New Jersey.



- [55] Katz†, Eian. (2013). *Between Here and There: Buffer Zones in International Law*. Yale University; The University of Chicago Law School.
- [56] Kaufman, Asher. (2016). *Belonging and Continuity: Israeli Druze and Lebanon, 1982–2000*. nt. *J. Middle East Stud.* 48, Cambridge: University of Notre Dame. Page: 635–654.
- [57] Kennedy, Scott. (1984). *The Druze of the Golan: A Case of Non-Violent Resistance*. *Journal of Palestine Studies*, Vol. 13, No. 2 (Winter, 1984), pp. 48-64. California: University of California Press.
- [58] Kershner, Isabel. (2017). *Israeli Aid Gives an Unexpected ‘Glimmer of Hope’ for Syrians*. [Online] Terdapat dalam <https://www.nytimes.com/2017/07/20/world/middleeast/israel-syria-humanitarian-aid.html>. [Diakses pada 21 November 2017].
- [59] Khoury, Jack, Noa Shpigel, & Yaniv Kubovich. (2017). *In Rare Move, Israel Says Ready to Protect Syrian Druze Town Under Attack by Islamic Militants*. [Online] Terdapat dalam <https://www.haaretz.com/israel-news/1.820878>. [Diakses pada 18 November 2017].
- [60] Kithinji, Michael Mwenda, et.al. (2016). "Foreign Policy Analysis, Globalisaion and New Security Dilemma" dalam *Kenya After 50: Reconfiguring Historical, Political, and Policy Milestones*. London: Palgrave Macmillan
- [61] Leng, Russel J. (2002). "Quantitative International Politics and Its Critics: Then and Now" dalam Frank P. Harvey dan Michael Brecher (ed.), *Evaluating Methodology in International Studies*. Ann Arbor: The University of Michigan Press, pp.116-130.
- [62] Lovett, Frank. (2009). *Domination and Distributive Justice*. *The Journal of Politics*, Vol. 71, No. 3. Chicago: The University of Chicago Press on behalf of the Southern Political Science Association. pp. 817-830.
- [63] Mansour, Reda. (2015). *What do Israel's Druze Want?*. [Online] Terdapat dalam <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4674488,00.html>. [Diakses pada 13 Juli 2017].
- [64] Mauss, Marcel. (1967). *The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies*. Translated by Cunnison, Ian. New York: Norton.
- [65] Mitchell, Chris. (2015). *Next Mideast Flashpoint? ISIS Threatens Druze*. [Online] Terdapat dalam <http://www1.cbn.com/cbnnews/insideisrael/2015/June/Next-Mideast-Flashpoint-ISIS-Threatens-Druze>. [Diakses pada 22 Maret 2017].
- [66] Mitchell, Chris. (2015). *Next Mideast Flashpoint? ISIS Threatens Druze*. [Online] Terdapat dalam <http://www1.cbn.com/cbnnews/insideisrael/2015/June/Next-Mideast-Flashpoint-ISIS-Threatens-Druze>. [Diakses pada 22 Maret 2017].
- [67] Morgenthau, H. (1962) *A Political Theory of Foreign Aid*. Dalam *The American Political Science Review*, LVI (2), 301-309.
- [68] Nabulsi, Karma. (t.t). *Jus ad Bellum/Jus in Bello*. [Online] terdapat dalam <http://users.ox.ac.uk/~polf0002/director/publications/jusadbellum.pdf>. [Diakses pada 17 oktober 2017].
- [69] Newman, W. Lawrence. (1997). *Social Research Methods “Qualitative and Quantitative Approach”* Third Edition, Allyn & Bacon. Boston: Pearson Education Inc.
- [70] Omar, Fadi. (2016). *The Israeli Democracy Index 2016 Attitudes of Arab Citizens of Israel*. Guttman Center for Public Opinion and Policy Research team. [Online] Terdapat dalam [www.idi.org.il](http://www.idi.org.il). [Diakses pada 10 Januari 2017].
- [71] Ostrovitz, Nina Landfield. (1983). *Who Are the Druze?* *World Affairs*, Vol. 146, No. 3, Subnational Conflict, pp. 272-276.
- [72] Paquin, Jonathan & Saideman, Michael. (1997). "Foreign Intervention in Ethnic Conflicts". [Online Terdapat dalam] [www.humansecuritygateway.com/document/ISA\\_foreigninterventionethnicconflict.pdf](http://www.humansecuritygateway.com/document/ISA_foreigninterventionethnicconflict.pdf). [diakses pada 26 Februari 2018].
- [73] Parsons, Laila. (1997). *The Palestinian Druze in the 1947-1949 Arab-Israeli War*. *Israel Studies*, Vol. 2, No. 1 pp. 72-93. Indiana: Indiana University Press.
- [74] Partem, Michael Greenfield. (1983). *The Buffer System in International Relations*. *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 27, No. 1. Jerusalem: Law School Hebrew University.
- [75] Permatasari, Anggalia Putri. (2007). *Thesis Keamanan dalam Studi Hubungan Internasional*. [Online] Terdapat dalam [https://www.academia.edu/6559705/Konsep\\_si\\_Keamanan\\_dalam\\_Studi\\_Hubungan\\_Internasional](https://www.academia.edu/6559705/Konsep_si_Keamanan_dalam_Studi_Hubungan_Internasional). [Diakses pada 12 Mei 2017] Bandung: Universitas Padjadjaran.
- [76] Pierre van den Berghe. (1987). "Ethnicity, Culture, And The Past", *Michigan Quarterly Review* Vol. XXXVI, no. 4 (Fall 1997). [Online Terdapat dalam] <http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/textidx?cc=mqr;c=mqr;c=mqrarchive;idno=act2080.0036.411;rgn=main;view=text;xc=1;g=mqrq>. [diakses pada 26 Februari 2018].
- [77] Polish Aid. t.t. *Humanitarian aid* [Online] terdapat dalam <https://polskapomoc.gov.pl/Humanitarian,aid,251.html>. [Diakses pada 2 Juni 2017].
- [78] Reback, Gedalyah. (2015). *Military Says No Intention to Absorb Refugees, But Memory of Holocaust Requires Action to Avert 'Mass Genocide'*. [Online] Terdapat dalam <https://www.timesofisrael.com/israel-weighs-safe-zone-for-syrias-embattled-druze/>. [Diakses pada 24 Februari 2018].
- [79] ReformJudaism. (2017). *Druze Community in Israel*. [Online] Terdapat dalam <https://reformjudaism.org/druze-community-israel>. [Diakses pada 27 Januari 2018].
- [80] Rollins, Tom. (2016). *Unrest Grows Among Druze in Syria's Sweida*. [Online] Terdapat

- dalam  
<https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2016/09/01/unrest-grows-among-druze-in-syrias-sweida> [Diakses pada 22 Maret 2017].
- [81] Rudolph, Chris. (2007). *Immigration Phobia and the Security Dilemma*. The Journal of Politics, Vol. 69, No. 4. Chicago: The University of Chicago Press. pp. 1228-1230.
- [82] Saideman, Stephen M. (2001). *The Ties That Divide: Ethnic Politics, Foreign Policy, And International Conflict*. New York: Columbia University Press.
- [83] Samaha, Nour. (2015). Druze residents in Israel denounce its Syria policy. [Online] Terdapat dalam <http://www.aljazeera.com/news/2015/06/druze-residents-israel-denounce-syria-policy-150628061812880.html>. [Diakses pada 30 Mei 2017].
- [84] Sheva, Arutz. (2016). ISIS singles out and executes Druze prisoners. [Online] Terdapat dalam <http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/210578>. [Diakses pada 22 Maret 2017].
- [85] Silalahi, U. (2006). "Metode Penelitian Sosial". Bandung: Unpar Press.
- [86] Singarimbun dan Effendi, (2003). *Metode Penelitian Survey*, Cetakan kedua, Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- [87] Smith, Shane. (2003). *Buffer Zones*. [Online] Terdapat dalam <http://www.beyondintractability.org/essay/buffer-zones>. [Diakses pada 14 oktober 2017].
- [88] Sørensen, G. (2004) *The Transformation of the State: Beyond the Myth of Retreat*, Hampshire. New York: Palgrave Macmillan.
- [89] Tang, Shiping. (2011). "The security dilemma and ethnic conflict: toward a dynamic and integrative theory of ethnic conflict." *Review of International Studies*. Vol 37. British International Studies Association. Pp 511-536.
- [90] Tarnopolsky, Noga. (2014). Golan Heights Druze sit precariously between Syria and Israel. [Online] Terdapat dalam <https://www.pri.org/stories/2014-11-12/golan-heights-druze-sit-precariouly-between-syria-and-israel> GlobalPost. [Diakses pada 8 Januari 2018].
- [91] Wood, Josh. (2015). Syria's Druze in the line of fire as war finally catches up with them. [Online] Terdapat dalam <https://www.thenational.ae/world/syria-s-druze-in-the-line-of-fire-as-war-finally-catches-up-with-them-1.96264>. Josh Wood Foreign Correspondent. [Diakses pada 1 April 2017].
- [92] Zisser, Eyal. (2015). The Druze's growing predicament. [Online] Terdapat dalam [http://www.israelhayom.com/site/newsletter\\_opinion.php?id=12873](http://www.israelhayom.com/site/newsletter_opinion.php?id=12873). [Diakses pada 13 Juli 2017].
- [93] Zsakola, Albin. (2016). Pro-Assad Druze fighters leave Palmyra front over mistreatment. [Online] Terdapat dalam <https://now.mmedia.me/lb/en/NewsReports/567107-pro-assad-druze-fighters-leave-palmyra-front-over-mistreatment>. [Diakses pada 22 Maret 2017].